



Pemerintah Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2023-2026



**DINAS KESEHATAN**

PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta 2023-2026 dipergunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan DIY. Dokumen Renstra Dinkes DIY merupakan dokumen perencanaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY menguraikan langkah dan upaya terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program urusan kesehatan yang terdapat dalam dokumen RPD DIY tahun 2013–2026 ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut disusun secara terencana melalui pendanaan indikatif yang berkelanjutan serta terukur melalui target kinerja kegiatan di setiap tahunnya. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi setiap bidang dan unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui dokumen ini, Dinas Kesehatan DIY beserta seluruh perangkatnya menegaskan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2013–2026.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung empat tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan berjalan dengan baik dengan didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR TABEL .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Maksud dan Tujuan .....	8
1.3 Dasar Penyusunan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan Perangkat Daerah .....	53
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dalam RPJPD DIY 2005-2025 .....	54
3.3 Telaah Renstra K/L .....	56
3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	65
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	83
BAB VIII PENUTUP .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan DIY.....	16
Gambar 4. 1 Capaian IKPS DIY.....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY .....	17
Tabel 2. 2 Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di DIY Tahun 2021 .....	20
Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kesehatan di DIY 2021.....	20
Tabel 2. 4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	22
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	46
Tabel 2. 6 Perbandingan Indikator Renstra Dinkes DIY dan Renstra Kemenkes RI .....	49
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan.....	64
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan.....	65
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	66
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	83

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah ditetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Ini bermakna bahwa kesehatan menjadi hak fundamental setiap warga negara. Maka negara, melalui pembangunan yang dilaksanakan memberikan perhatian khusus pada sektor kesehatan. Bersama segenap komponen Bangsa Indonesia, pembangunan kesehatan disusun, direncanakan dan dilaksanakan sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan yang baik adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Menjadi sebuah upaya bersama seluruh potensi bangsa Indonesia, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan dimotori dan dikoordinasikan oleh pemerintah. Derajat kesehatan yang tinggi juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Regulasi penyusunan Renstra OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Renstra 2023-2026 ini diperlukan untuk menyikapi masa transisi setelah berakhirnya RPJMD 2017-2022 dan sebelum tersusunnya RPJMD untuk periode berikutnya. Acuan yang digunakan yaitu RPJP DIY 2005-2025, sinkronisasi dengan RPJMN 2020-2024, dan memperhatikan evaluasi capaian RPJMD 2017-2022 serta Agenda Prioritas Gubernur DIY.

Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi RPJMN 2020-2024 yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); serta Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Amanat ini selanjutnya dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan, RPJMD DIY diamanatkan untuk memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025, yaitu mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Atas dasar hal tersebut, di dalam Renstra 2023-2026 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan DIY yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dengan mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu juga tidak

bisa dilepaskan dari tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula gusti*.

Adanya penyebaran wabah COVID-19 yang meluas di seluruh dunia dan ditetapkannya sebagai pandemi berdampak pada segala aspek kehidupan. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu *SARS-CoV-2* yang juga disebut virus Corona. COVID-19 secara resmi ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejak tanggal 3 Maret 2020, Gubernur DIY telah memberikan arahan melalui Surat Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/Instr./2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 untuk menjadi dasar penanganan epidemi di wilayah DIY. Kasus pertama COVID-19 di DIY terjadi pada tanggal 15 Maret 2020, telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Gubernur DIY No. 65 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang status tanggap darurat di DIY sebagaimana telah diubah terakhir melalui Keputusan Gubernur DIY nomor 386/KEP/2021 tentang penetapan perpanjangan kesembilan belas status tanggap darurat bencana *corona virus disease 2019* (COVID-19) di DIY yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Gubernur DIY telah menetapkan satuan tugas penanganan melalui Keputusan nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas penanganan COVID-19 di DIY sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 32/KEP/2021

tentang perubahan atas Keputusan Gubernur DIY nomor 3/KEP/2021 tentang pembentukan Satuan tugas penanganan COVID-19 di DIY. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terdiri dari berbagai klaster dan salah satunya adalah bidang kesehatan.

Selama kurun waktu dua tahun lebih telah dilakukan berbagai upaya penanganan pandemi COVID-19 serta percepatan vaksinasi COVID-19. Diperkirakan oleh para pakar nantinya COVID-19 tidak lagi bersifat pandemik, melainkan menjadi endemik. Selama kurun waktu 2023-2026 masih diperlukan berbagai upaya untuk penanganan pandemi, percepatan vaksinasi, persiapan penanganan pasca pandemi, serta persiapan penanganan kondisi endemik. Di samping itu, program kegiatan juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan lainnya yang masih menjadi prioritas serta hal-hal yang menjadi amanat Standar Pelayanan Minimal di antaranya: permasalahan kedaruratan dan potensi bencana lainnya, *multiple burden disease* dari penyakit tidak menular *degeneratif*, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (*re-emerging and new emerging disease*) serta potensi kejadian luar biasa, permasalahan gizi dan kesehatan ibu dan anak, serta permasalahan dalam pelayanan kesehatan (kualitas pelayanan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dokumen Rencana strategis OPD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan DIY disusun untuk periode tahun 2023-2026. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat dengan mengakomodir berbagai permasalahan kesehatan tersebut di atas. Keseluruhan proses penyusunan Renstra akan menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya Renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD atau Renja OPD.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah

4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal
5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari renstra dapat dipertanggungjawabkan.
6. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dalam setiap proses tahapan.
7. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi OPD Dinas Kesehatan DIY dalam menyusun Rencana Kerja OPD dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah DIY dalam kurun waktu empat tahun. Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY juga berfungsi sebagai acuan sektor kesehatan di DIY serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor kesehatan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah.

### Maksud

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan DIY disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan kesehatan di DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan di DIY.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di DIY saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi.

### Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan DIY yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan DIY dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antarpelaku pembangunan bidang kesehatan.

### **1.3 Dasar Penyusunan**

Rencana strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 disusun dengan beberapa hal yang mendasari, antara lain:

1. Adanya agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang salah satu agendanya yaitu lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
2. Adanya kebijakan pembangunan dalam RPJPD 2005-2025 dalam mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera,
3. Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024 dengan penjabaran visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan,
4. Adanya arahan Gubernur DIY yang berisi perintah agar seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Transisi Provinsi Tahun 2023-2026.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Kesehatan DIY diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan DIY mempunyai fungsi sesuai dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
3. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
5. Penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
6. Pengelolaan sumber daya kesehatan;
7. Pengembangan upaya kesehatan tradisional;
8. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
10. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Pelaksanaan kegiatan kesekretariat;
12. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dalam Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Kesehatan DIY dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;

- b. Kelompok Substansi Program; dan
  - c. Kelompok Substansi Keuangan.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
    - a. Seksi Pengendalian Penyakit; dan
    - b. Seksi Pencegahan Penyakit
  4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
    - a. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan
    - b. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain.
  5. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
    - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
    - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.
  6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
    - a. Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
    - b. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.
  7. Unit Pelaksana Teknis; dan
  8. Jabatan fungsional.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan DIY terdiri atas:

1. RS Jiwa Grhasia

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya untuk:

- a. meningkatkan persentase pasien yang mampu ADL (*activity daily living*);
- b. menurunkan angka pasien cedera karena fiksasi;
- c. meningkatkan waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) menit;
- d. meningkatkan rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun;
- e. meningkatkan waktu tunggu pelayanan rawat jalan jiwa kurang dari atau sama dengan 60 (enam puluh) menit;
- f. meningkatkan tingkat penggunaan tempat tidur/ *Bed Occupancy Rate*;
- g. meningkatkan penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan;

- h. meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan Rumah Sakit;
- i. meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja; dan
- j. meningkatkan kesesuaian inventarisasi barang Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut RS Jiwa Grhasia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pengendalian di Rumah Sakit;
- b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan, khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

## 2. RS Paru Respira

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Respira pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Paru Respira mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya untuk:

- a. meningkatkan angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) Tuberculosis;
- b. menurunkan angka kematian pasien lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam;
- c. meningkatkan rata-rata kunjungan rawat jalan per hari;
- d. meningkatkan *Bed Occupancy Rate*; dan
- e. menurunkan *Length of Stay*.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Paru Respira mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan, khususnya kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya;
- b. penyusunan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan; kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya secara paripurna sesuai kebutuhan medis;
- e. pengembangan sumber daya manusia Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

### 3. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pada Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
- c. pelayanan pemeriksaan klinis, medis, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan dan rujukan laboratorium;
- d. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
- f. penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium, konsultasi laboratorium dan penelitian;
- g. pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
- h. pemantapan mutu eksternal laboratorium;
- i. pelaksanaan pemasaran produk Balai;

- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### 4. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pada Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan persentase mantan linatih yang meningkatkan kompetensinya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan serta pelatihan keterampilan kesehatan bagi masyarakat;
- c. pengembangan pelatihan bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pelatihan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pengembangan metode pelatihan;
- f. pengembangan kemitraan pelatihan bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

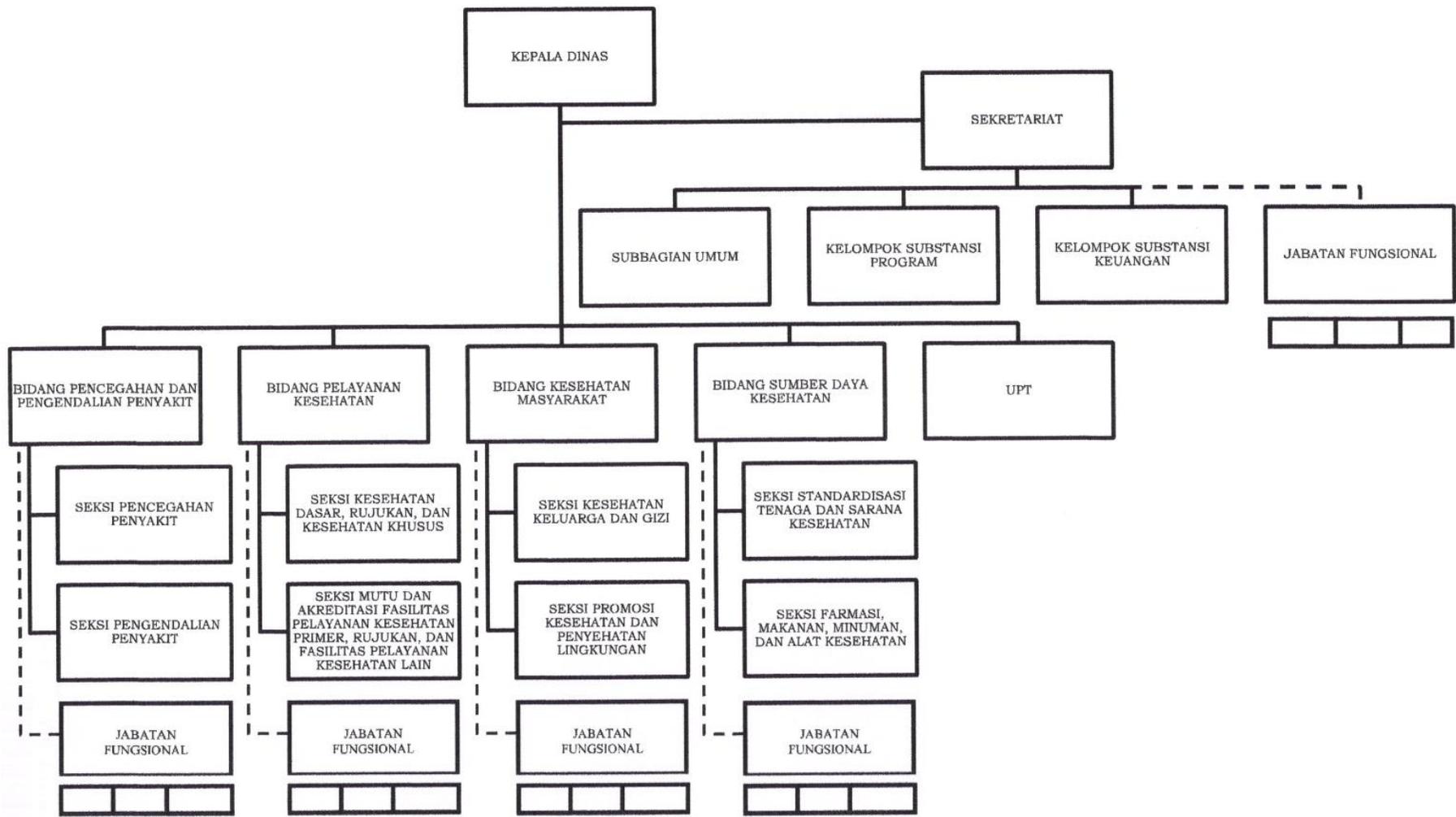
#### 5. Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos)

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pada Dinas Kesehatan, Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat DIY untuk meningkatkan persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. penyelenggaraan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan sosial;
- c. penyelenggaraan manajemen pelayanan jaminan kesehatan;
- d. penyelenggaraan manajemen klaim;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan DIY

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dari hasil updating data yang dilakukan Dinas Kesehatan DIY per 31 Desember 2021, keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Kesehatan (induk) dan UPT adalah 649 orang. Distribusi sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan DIY ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Distribusi Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY

Instansi	SP	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
Dinas Kesehatan	-	33	34	3	23	-	5	-	2
RS Jiwa Grhasia	10	29	68	53	115	-	18	-	-
RS Paru Respira	4	6	55	14	72	1	8	4	-
Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	-	4	7	1	5	-	-	2	-
Balai Laboratorium Kesehatan	1	5	11	12	18	-	3	-	-
Balai Pelatihan Kesehatan	-	8	5	3	4	-	3	-	-
Jumlah	15	85	180	86	237	1	37	6	2

(Sumber: Data Kepegawaian Dinkes DIY, 2021)

Sebagai penunjang semua program dibutuhkan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan DIY. Aset tanah keseluruhan yang dimiliki Dinas Kesehatan DIY per 31 Desember 2021 adalah 31.656 m<sup>2</sup> dengan rincian Dinas Induk seluas 7.589 m<sup>2</sup>, Bapelkes seluas 11.585 m<sup>2</sup>, Balai Laboratorium Kesehatan seluas 10.623 m<sup>2</sup> dan Bapel Jamkesos 1.839 m<sup>2</sup>. Untuk RS Jiwa Grhasia DIY menempati tanah kedaulatan "Sultan Ground" dengan status hak pakai yaitu lahan RS seluas 56.390 m<sup>2</sup> sesuai SK Bupati Sleman No 20 IL/Kep.KDH/ A/2010 yang terletak di Jalan Kaliurang km 17, Pakem Sleman dan makam pasien dan tanah pertanian seluas 15.015 m<sup>2</sup> di Dusun Kopatan, Kelurahan Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Sleman. Luas bangunan RS Jiwa Grhasia per 31 Desember 2017 adalah 23.636,71 m<sup>2</sup>. Luas tanah RS Paru Respira adalah 1.924 m<sup>2</sup> dan luas bangunan gedung 2.490 m<sup>2</sup>. Untuk pengembangan pelayanan di RS Paru Respira diperlukan penambahan tanah seluas 10 Ha. Sesuai dengan *master plan* rumah sakit, pada tahap awal diperlukan 1 Ha untuk pembangunan ruang rawat inap serta sarana pendukung dan 9 Ha akan dipergunakan untuk perawatan pasien TB (TB-HIV, TB BTA + dan TB Resisten Obat) terintegrasi.

Aset kendaraan Dinas Kesehatan DIY tahun 2021 berjumlah 50 unit terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 23 buah dan roda dua sebanyak 27 buah. Barang inventaris lain yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja OPD Dinas Kesehatan DIY antara lain

meliputi alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan, instalasi, jaringan, dan lainnya keseluruhan. Kendaraan di RS Jiwa Grhasia 14 Kendaraan yang terdiri dari kendaraan operasional sebanyak 6 buah, mobil eselon 2, mobil ambulan 4, mobil jenazah 1 dan kendaraan roda dua ada 2 unit. Kendaraan di RS Paru Respira sebanyak 14 yang terdiri dari kendaraan operasional 2, ambulans 3, mobil jenazah 1 dan kendaraan roda 2 sebanyak 8 buah. Terkait sarana prasarana di RS Paru Respira memiliki 19 jenis sarana prasarana pelayanan sementara jumlah yang dibutuhkan 21 jenis. Masih ada 2 jenis yang dibutuhkan yakni ruang pemulasaran jenazah dan dapur.

Secara umum terkait fasilitas pelayanan kesehatan di DIY relatif cukup banyak baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau keseluruhan Kecamatan yang ada di Kabupaten/kota. Bahkan jika digabungkan dengan puskesmas pembantu sebagai jaringan pelayannya, telah mampu menjangkau seluruh desa yang ada. Jumlah puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 121 unit, 49 di antaranya memiliki instalasi rawat inap. Sedangkan Puskesmas Pembantu sampai tahun 2020 sebanyak 311 buah. Dari sejumlah total 121 puskesmas tersebut, pada tahun 2020 seluruh puskesmas telah terakreditasi. Seluruh Puskesmas telah dilengkapi dengan jaringan Puskesmas (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa), jejaring puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri) dan memiliki jaringan kemitraan dengan Desa Siaga di seluruh wilayah. Jumlah Puskesmas yang dimiliki DIY sudah memenuhi target nasional (1 Puskesmas/30.000 penduduk).

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di DIY juga relatif telah memadai dengan berbagai jenis pelayannya. Rumah sakit pemerintah tersedia di kelima kabupaten/kota. Perkembangan pelayanan rujukan di sektor swasta sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Fasilitas pelayanan rujukan khusus juga telah berkembang, di antaranya untuk jenis pelayanan bedah, mata, jiwa, dan paru. Pada tahun 2020, di DIY terdapat 80 rumah sakit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 rumah sakit (85%) telah terakreditasi. Jumlah Tempat Tidur (TT) yang tersedia di DIY sudah mencukupi bila dibandingkan standar nasional dan *World Health Organization* (WHO) (1 TT:1000 penduduk). Angka ketersediaan di DIY 1,85 TT/1000 penduduk, sedangkan acuan nasional 1 TT/1000 penduduk. Tetapi permasalahannya adalah persebaran rumah sakit yang berimplikasi jumlah tempat tidur pada kabupaten kota, di mana sebagian besar terkonsentrasi di wilayah kota Yogyakarta

dan kabupaten Sleman. Dampak yang jelas terlihat pada penduduk di Gunungkidul, dimana 1 TT RS melayani 1.424 penduduk, dibandingkan penduduk kota Yogyakarta pada 1 TT RS melayani 242 penduduk.

Berdasarkan kajian indeks risiko bencana dan kejadian kecelakaan lalu lintas di DIY, sistem pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) memegang peranan penting. Pelayanan pra rujukan yang baik membawa dampak pada penurunan angka kematian dan kesakitan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan SPGDT telah dilakukan penyelenggaraan public safety center (PSC) pada pemerintah provinsi maupun 5 kabupaten kota di DIY. Secara kompetensi SDM telah dilakukan gladi secara berkala. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan pendukung lain telah dilengkapi secara bertahap. Untuk sistem informasi, telah dikembangkan aplikasi SPGDT, yang saat ini telah mampu menyediakan data tempat tidur terintegrasi dengan aplikasi RS Online Kementerian Kesehatan, data sebaran fasyankes dan pelaporan pelayanan yang dilaksanakan oleh PSC di provinsi maupun 5 kabupaten kota. Masyarakat di DIY pun telah memiliki peran serta dalam upaya rujukan. Terbukti beberapa ormas dan wilayah memiliki ambulans atau kendaraan perujuk yang memang sangat membantu kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun demikian, masih perlu ditata manajemen dan mutu pelayanan pra rujukan yang terintegrasi antara upaya masyarakat, PSC, FKTP dan FKRTL. Masih perlu dilakukan standarisasi pelayanan PSC, standarisasi dan registrasi ambulans/kendaraan yang digunakan untuk merujuk dan peningkatan kapasitas tim baik tim ambulans/ kendaraan perujuk masyarakat, PSC, FKTP dan FKRTL.

Fasilitas pelayanan kesehatan pendukung seperti klinik kesehatan dan apotek juga berkembang baik dengan semakin besarnya peran swasta. Dalam 5 tahun terakhir telah tumbuh berbagai sarana pelayanan pendukung klinik kesehatan dan apotek. Jumlah klinik pada tahun 2020 ada sekitar 314 klinik dan 60 % di antaranya sudah teregistrasi. Upaya peningkatan pelayanan dan mutu klinik dikembangkan dengan mendorong agar semua klinik terregistrasi, mendorong identifikasi ketersediaan atau pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di klinik serta ketenagaannya, dan mendorong pembinaan akreditasi klinik. Pemerintah Daerah DIY sendiri telah memiliki sarana Balai Laboratorium Kesehatan (UPT) yang merupakan rujukan daerah dan regional untuk laboratorium kesehatan.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota juga berkembang. Di tingkat Provinsi terdapat UPTD Jamkesos yang memberikan pelayanan teknis melalui jaminan pembiayaan kesehatan di tingkat Provinsi, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan UPT Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan). Di Tingkat Kabupaten Kota juga tersedia UPTD Jaminan Kesehatan tersedia di setiap kabupaten/kota. Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan di DIY per kabupaten/kota 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di DIY Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah			
	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Apotek
Kota Yogyakarta	20	18	90	139
Kab. Sleman	27	25	116	241
Kab. Bantul	16	27	72	181
Kab. Kulon Progo	9	21	16	58
Kab. Gunungkidul	8	30	29	57
DIY	80	121	323	676

(Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab/Kota, 2021 & Dinas Kesehatan DIY, 2021)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar telah meningkat secara kualitas. Dari 121 Puskesmas yang ada di DIY, pada akhir tahun 2020 telah tercapai 121 puskesmas yang terakreditasi. Puskesmas yang telah dikembangkan menjadi puskesmas rawat inap sebanyak 49 puskesmas dan 72 puskesmas rawat jalan.

Ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah DIY untuk dokter umum, perawat sudah memenuhi standar nasional tetapi penyebarannya belum merata. Distribusi tenaga kesehatan terbanyak adalah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Gambaran menyeluruh distribusi tenaga kesehatan di DIY berdasarkan kabupaten/kota per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kesehatan di DIY 2021

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	DIY
1	Medis	1112	2257	219	146	390	4124
2	Perawat	2360	3558	1489	616	785	8808
3	Gizi	89	197	101	64	101	552
4	Farmasi	399	799	223	60	94	1575
5	Kesehatan Masyarakat	34	25	59	23	31	172
6	Bidan	367	723	457	254	317	2118

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	DIY
7	Kesehatan Lingkungan	54	126	75	43	57	355
8	Keterampilan Fisik	92	175	68	3	0	338
9	Keteknisian Medis	302	504	178	38	0	1022

(Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab/Kota, 2021 & Dinas Kesehatan DIY, 2021)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	SPM Kesehatan																		
A	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		100 %		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a
B	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi		100 %		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a
II	Standar IKK Non SPM																		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.19%	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a
III	Renstra Dinas Kesehatan DIY																		
A	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular			n/a	n/a	n/a	61.26%	62.84%	n/a	n/a	n/a	61.78 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100.85	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di bina sesuai kebutuhan			n/a	n/a	n/a	n/a	5 kab/kot a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
a	Sub Kegiatan: Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar (Dinkes)			n/a	30 sarana	-	30 sarana	30 sarana	n/a	30 sarana	-	30 sarana	n/a	n/a	100	-	100	n/a
b	Sub Kegiatan: Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan gedung trauma healing dan visumet repertum (RS Grhasia)			n/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	n/a	100	100	100	n/a
c	Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit	Tersedia tahap persiapan pengadaan tanah (RSP Respira)			n/a	-	-	1 paket	1 paket	n/a	-	-	1 paket	n/a	n/a	-	-	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
d	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan, dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya obat-obatan untuk pasien(RS Repira)			n/a	1 paket	-	3 paket	2 paket	n/a	1 paket	-	3 paket	n/a	n/a	100	-	100	n/a
e	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan (RS Respira)			n/a	28 jenis	23 jenis	26 jenis	18 jenis	n/a	28 jenis	23 jenis	26 jenis	n/a	n/a	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
a	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- BKK pengadaan Alat kesehatan RSUD Saptosari			n/a	-	100%	-	1 paket	n/a	-	100%	-	n/a	n/a	-	100	-	n/a
		- Hibah PMI			n/a	500,000,000	500,000,000	1 paket	1 thn	n/a	500,000,000	500,000,000	1 paket	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Obat Bufferstock dan Perbekes Tersedia			n/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	n/a	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		- Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan			n/a	-	-	-	100%	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	n/a
b	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyelidikan Epidemiologi <24 jam			n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	100	100	100	100	n/a
c	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	- Anak <1th mendapat imunisasi lengkap			n/a	93%	96.00%	95%	95%	n/a	93%	96.71%	75.60 %	n/a	n/a	100	100.7	79.58	79.58	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/boster			n/a	80.50%	91%	90%	90%	n/a	80.50%	94.30%	57%	n/a	n/a	100	103.6	63.33	n/a
		- Persentase K4			n/a	74%	75%	76%	77%	n/a	74%	75%	77.53 %	n/a	n/a	100	100	102.01	n/a
		- Persentase KN1			n/a	86%	87%	88%	89%	n/a	86%	87%	81.29 %	n/a	n/a	100	100	92.38	n/a
d	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase Puskesmas PKPR			n/a	-	-	69%	73%	n/a	-	-	69.40 %	n/a	n/a	-	-	100.58	n/a
e	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Puskesmas Santun Lansia			n/a	-	-	90%	94%	n/a	-	-	90.10 %	n/a	n/a	-	-	100.11	n/a
f	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Persentase Penurunan Balita Kurus			n/a	0.10%	0.10%	0.10%	0.40%	n/a	0.10%	0.10%	0.10%	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Persentase Penurunan Ibu Hamil			n/a	0.25%	0.25%	0.25%	1%	n/a	0.25%	0.25%	0.25%	n/a	n/a	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		KEK																	
g	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja			n/a	-	193 unit	197 pos	197 Pos	n/a	-	195 unit	193 pos	n/a	n/a	-	101.04	97.97	n/a
		- Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga			n/a	-	-	121 puskesmas	121 Pusk	n/a	-	-	121 puskesmas	n/a	n/a	-	-	100	n/a
h	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			n/a	60 desa/kelurahan	50 desa	100%	180 desa/kel	n/a	60 desa/kelurahan	50 desa	100%	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)			n/a	1182 sekolah	-	2365 desa	2365 sekolah	n/a	1182 sekolah	-	2991 desa	n/a	n/a	100	-	126.47	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)			n/a	5 kab/kota	1 dokumen	5 kab/kota	5 kab/kota	n/a	5 kab/kota	1 dokumen	5 kab/kota	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- BKK jambanisasi			n/a	2,000,000,000	-	100%	4 kab	n/a	2,000,000,000	-	100%	n/a	n/a	100	-	100	n/a
i	Subkegiatan: Pengelolaan Promosi Kesehatan	- Kajian pemanfaatan media dan pembuatan promosi kesehatan			n/a	2 kab/kota	-	5 kab/kota	5 kab/kota	n/a	2 kab/kota	-	5 kab/kota	n/a	n/a	100	-	100	n/a
		- Kampanye Germas			n/a	5 kab/kota	3 jenis	5 kab/kota	5 kab/kota	n/a	5 kab/kota	3 jenis	5 kab/kota	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat			n/a	1 paket	-	5 kab/kota	5 kab/kota	n/a	1 paket	-	5 kab/kota	n/a	n/a	100	-	100	n/a
		- Penerbitan majalah mensana			n/a	2 edisi	-	5 kab/kota	5 kab/kota	n/a	2 edisi	-	5 kab/kota	n/a	n/a	100	-	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
j	Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya (Balabkes)			n/a	410 jenis	1 paket	1 paket	3 jenis	n/a	410 jenis	1 paket	1 paket	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Penyediaan Peralatan COVID			n/a	-	5 paket	1 unit	9 macam	n/a	-	5 paket	1 unit	n/a	n/a	-	100	100	n/a
		- Penyediaan Alat-Alat Laboratorium			n/a	10 jenis	24 macam	26 macam	29 macam	n/a	10 jenis	3 macam	26 macam	n/a	n/a	100	12.5	100	n/a
		- Hibah KPAD			n/a	500,000,000	500,000,000	-	1 tahun	n/a	500,000,000	500,000,000	-	n/a	n/a	100	100	-	n/a
k	Subkegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Cakupan Jaminan Kesehatan Penyangga (Bapeljam kesos)			n/a	25850 pasien	15750 pasien	100%	100%	n/a	35417 pasien	17935 pasien	100%	n/a	n/a	137.01	113.87	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		- Cakupan Jaminan Kesehatan Preventif (Bapeljam kesos)			n/a			10%	12%	n/a				10%	n/a	n/a			100	n/a
		- Cakupan Jaminan kesehatan Rehabilitatif (Bapeljam kesos)			n/a			20%	25%	n/a				20%	n/a	n/a			100	n/a
		- FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan			n/a	35 FKTL	6 FKTL	13 RS/FKTL	10 RS/FKTL	n/a	35 FKTL	6 FKTL	13 FKTL	n/a	n/a	100	100	100	100	n/a
	Subkegiatan: Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95%			n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Sasaran yang mendapat imunisasi COVID-19			n/a	-	-	80%	80%	n/a	-	-	86%	n/a	n/a	-	-	107.5	n/a
m	Subkegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	- Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar			n/a	35 puskesmas dan RS	3 fasyankes	40 fasyankes	45 Fasyankes	n/a	35 puskesmas dan RS	3 fasyankes	40 fasyankes	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan			n/a	20 klinik pratama	30 klinik	30 klinik	40 Klinik	n/a	20 klinik pratama	30 klinik	30 klinik	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar			n/a	80 puskesmas	100 puskesmas	121 puskesmas	121 Pusk	n/a	80 puskesmas	100 puskesmas	121 puskesmas	n/a	n/a	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan			n/a	40 RS	60 RS	80 RS	80 RS	n/a	40 RS	60 RS	80 RS	n/a	n/a	100	100	100	n/a
n	Subkegiatan: Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat (SPGDT)	Pengembangan pelayanan SPGDT			n/a	40 faskes	30 faskes	1 paket	100%	n/a	40 faskes	30 faskes	1 paket	n/a	n/a	100	100	100	n/a
o	Subkegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing & visum et repertum (RS Grhasia)			n/a	1 paket	-	-	1 paket	n/a	1 paket	-	-	n/a	n/a	100	-	-	n/a
		- Pengadaan perlengkapan ruang isolasi (RS Grhasia)			n/a	1 paket	-	-	1 paket	n/a	1 paket	-	-	n/a	n/a	100	-	-	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Penyusunan dokumen AMDAL lingkungan (RS Grhasia)			n/a	-	-	-	1 paket	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	n/a
		- Pengadaan hardware SIMRS (RS Grhasia)			n/a	-	-	1 paket	1 paket	n/a	-	-	1 paket	n/a	n/a	-	-	100	n/a
		- Tersedianya BMHP dan reagen (RS Respira)			n/a	2 paket	4 jenis	2 paket	2 paket	n/a	2 paket	4 jenis	2 paket	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Tersedianya alat bengkel (RS Respira)			n/a	-	-	-	3 jenis	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	n/a
3	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan			n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
a	Subkegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	- Buku Data Kesehatan Tahun 2021			n/a	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dok	n/a	-	1 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	-	100	100	n/a
		- Buku Profil Kesehatan Tahun 2021			n/a	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dok	n/a	-	1 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	-	100	100	n/a
		- Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap			n/a	200 materi	180 materi	180 materi	180 materi	n/a	200 materi	183 materi	197 materi	n/a	n/a	100	101.67	109.44	n/a
b	Subkegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan			n/a	-	-	6 sistem informasi	6 sistem informasi	n/a	-	-	6 sistem informasi	n/a	n/a	-	-	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu			n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
a	Subkegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu			n/a	121 puskesmas	-	121 puskesmas	121 Pusk	n/a	121 puskesmas	-	121 puskesmas	n/a	n/a	100	-	100	n/a
		- Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu			n/a	10 klinik	-	3 klinik	30 Klinik	n/a	10 klinik	-	3 klinik	n/a	n/a	100	-	100	n/a
		- Rumah Sakit Yang mendapatkan pembinaan mutu			n/a	40 RS	60 RS	78 RS	80 RS	n/a	40 RS	60 RS	78 RS	n/a	n/a	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu			n/a	1 labkes	-	5 laboratorium	5 Lab	n/a	1 labkes	-	5 laboratorium	n/a	n/a	100	-	100	n/a
B	Program: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya			n/a	n/a	n/a	66%	68%	n/a	n/a	n/a	84.5%	n/a	n/a	n/a	n/a	128.03	n/a
1	Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	- Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM			n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Daerah Provinsi	- Jumlah Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanak an			n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
a	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	FKTP dan FKTL yang mendapatk an pembinaan pemenuha n standar tenaga dan sarana			n/a	236 FKTP & FKTL	121 FKTP	40 FKTP dan FKTL	12 bulan	n/a	236 FKTP & FKTL	121 FKTP	40 FKTP dan FKTL	n/a	n/a	100	100	100	n/a
b	Subkegiatan: Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	- Jasa, Peralatan, dan Perlengkap an Perkantora n yang Mendukun g Operasion al Bapelkes (Bapelkes)			n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan	n/a	n/a	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Audit Mutu Internal Bapelkes			n/a	2 dokumen	2 laporan	1 laporan	2 laporan	n/a	2 dokumen	2 laporan	1 laporan	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Kurikulum Pelatihan yang Dibuat (Bapelkes)			n/a	1 dokumen	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	n/a	1 dokumen	1 kurikulum	1 kurikulum	n/a	n/a	100	100	100	n/a
		- Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat (Bapelkes)			n/a	-	-	-	1 laporan	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	n/a
		- Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat (Bapelkes)			n/a	-	-	-	1 laporan	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	n/a
		- Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) yang Dilakukan (Bapelkes)			n/a	3 dokumen	4 laporan	5 laporan	6 laporan	n/a	3 dokumen	4 laporan	5 laporan	n/a	n/a	100	100	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan (Bapelkes)			n/a	55 kegiatan	15 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	n/a	64 kegiatan	15 kegiatan	1 kegiatan	n/a	n/a	116.36	100	100	n/a
		- Pengembangan Sistem Pembelajaran (Bapelkes)			n/a	1 visualisasi	-	-	1 sistem	n/a	1 visualisasi	-	-	n/a	n/a	100	-	-	n/a
C	Program: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase kefarmasian, perbekes, dan makanan sesuai standar			n/a	n/a	n/a	81.07%	86.48%	n/a	n/a	n/a	81.07%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kegiatan: Pengendalian dan Penyawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatk an pembinaan sesuai dengan standar			n/a	n/a	n/a	n/a	35 sarana	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
a	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisiona l yang mendapatk an pembinaan			n/a	-	-	30 sarana	35 sarana	n/a	-	-	33 sarana	n/a	n/a	-	-	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
D	Program: PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkata n potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing			n/a	n/a	n/a	n/a	0.15%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Kegiatan: Pengembang an Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terseleng garanya pengemba ngan pelayanan kesehatan tradisional			n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
a	Sub Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	- Kajian Pengemba ngan Kesehatan Tradisional			n/a	-	-	1 dokum en	2 dok	n/a	-	-	1 dokum en	n/a	n/a	-	-	100	n/a
		- Penyehat Tradisiona l Mendapatk an Pembinaan Legalitas Pelayanan			n/a	3 jenis hatra	180 penyeha t tradision al	1 dokum en	1 dok	n/a	3 jenis hatra	0	1 dokum en	n/a	n/a	100	0	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Peningkatan Kapasitas Hatra di area wisata			n/a	-	-	1 dokumen	1 dok	n/a	-	-	1 dokumen	n/a	n/a	-	-	100	n/a
		- Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional dan konsultasi teknis kesehatan tradisional			n/a	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	n/a
		- Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu)			n/a	-	-	30 orang	1 dok	n/a	-	-	30 orang	n/a	n/a	-	-	100	n/a
		- Film Kesehatan Tradisional (Ramuan, Refleksi dan Akupunktur)			n/a	-	-	1 video	1 dok	n/a	-	-	1 video	n/a	n/a	-	-	100	n/a

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- Pameran Jamu			n/a	2 dokumen	-	-	1 dok	n/a	2 dokumen	-	-	n/a	n/a	100	-	-	n/a
		- Lomba Film, vlog dan liputan kestrad			n/a	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	n/a

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	6 (2022)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	6 (2022)	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4	Pendapatan Daerah	n/a	n/a	n/a	37,849,903,700	7,956,000,000	n/a	n/a	n/a	38,741,796,742.22	n/a			

Uraian***)		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	6 (2022)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	6 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	n/a	n/a	n/a	37,849,903,700	7,956,000,000	n/a	n/a	n/a	38,741,796,742.22	n/a		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	n/a	n/a	n/a	37,849,903,700	7,956,000,000	n/a	n/a	n/a	38,741,796,742.22	n/a		
5	Belanja Daerah	n/a	n/a	n/a	301,964,086,323	214,829,584,336	n/a	n/a	n/a	235,528,032,420	n/a		
5.1	Belanja Operasi	n/a	n/a	n/a	279,578,050,783	186,810,205,145	n/a	n/a	n/a	215,920,301,857	n/a		
5.1.01	Belanja Pegawai	n/a	n/a	n/a	101,375,790,951	35,272,040,961	n/a	n/a	n/a	93,184,380,617	n/a		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	n/a	n/a	n/a	176,424,871,832	150,491,764,184	n/a	n/a	n/a	121,556,476,124	n/a		
5.1.05	Belanja Hibah	n/a	n/a	n/a	1,777,388,000	1,046,400,000	n/a	n/a	n/a	1,179,445,116	n/a		
5.2	Belanja Modal	n/a	n/a	n/a	22,386,035,540	28,019,379,191	n/a	n/a	n/a	19,607,730,563	n/a		

Uraian***)		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	6 (2022)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	6 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	n/a	n/a	n/a	15,114,821,740	4,396,160,600	n/a	n/a	n/a	12,864,728,314	n/a		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	n/a	n/a	n/a	7,222,213,800	23,401,359,000	n/a	n/a	n/a	5,799,492,249	n/a		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	n/a	n/a	n/a	-	27,000,000	n/a	n/a	n/a	-	n/a		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	n/a	n/a	n/a	49,000,000	194,859,591	n/a	n/a	n/a	943,510,000	n/a		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 2. 6 Perbandingan Indikator Renstra Dinkes DIY dan Renstra Kemenkes RI

No.	Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Target Renstra Kemenkes 2020-2024	Program Dinas Kesehatan DIY 2021	Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021	Indikator 2021	Target 2021	Capaian 2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10%	10%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase bumil KEK	0,25%	0,25%	
2		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95%	95%			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1) Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan/booster 2) Anak kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi lengkap 3) Persentase KN1 4) Persentase K4	1) 90% 2) 95% 3) 88% 4) 76%	
3		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota	514 kab/kota						
4		Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14%	14%						
5		Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60%	60%						

No.	Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Target Renstra Kemenkes 2020-2024	Program Dinas Kesehatan DIY 2021	Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021	Indikator 2021	Target 2021	Capaian 2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6		Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100%	100%						
7		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50%	50%		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kampanye GERMAS	5 kab/kota	5 kab/kota	
8		100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514)	514 kab/kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota	5 kab/kota	
9		Kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota	420 kab/kota						
10	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas	100%		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan	121 puskesmas	121 puskesmas	Setiap kecamatan di DIY telah memiliki minimal 1 puskesmas
11		Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1000 sebesar 100%	100%						

No.	Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Target Renstra Kemenkes 2020-2024	Program Dinas Kesehatan DIY 2021	Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021	Indikator 2021	Target 2021	Capaian 2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12		Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%	100%		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 puskesmas	121 puskesmas	
13		Persentase RS terakreditasi sebesar 100%	100%		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RS yang mendapatkan pembinaan mutu	78 RS	78 RS	Status akreditasi RS di DIY tahun 2020: sebanyak 68 RS telah terakreditasi dan 12 RS belum terakreditasi
14		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain	500 fasyankes		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1) Laboratorium yang mendapatkan Pembinaan Mutu 2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	1) 5 laboratorium 2) 3 klinik	1) 5 laboratorium 2) 3 klinik	
15	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024	190 per 100.000 penduduk		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1) Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 2) Kab/Kota yang melakukan posbindu standar dan PANDU PTM 3) Klinik yang	1) 80% 2) 5 kab/kota 3) 100% 4) 40 desa 5) 92.38% 6) 5 kab/kota 7) 80% 8) 5 kab/kota	1) 86% 2) 5 kab/kota 3) 100% 4) 40 desa 5) 92.38% 6) 5 kab/kota 7) 100% 8) 5 kab/kota	- Kasus TBC Paru BTA (+) tahun 2020: 2.721 - Kasus baru HIV tahun 2020: 363 - Kasus positif malaria tahun 2020: 8 - Anak kurang dari 1 tahun mendapat
16	Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024	0,18%							
17	Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota	405							

No.	Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024	Target Renstra Kemenkes 2020-2024	Program Dinas Kesehatan DIY 2021	Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021	Indikator 2021	Target 2021	Capaian 2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18		Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95%	95%			melaksanakan strategi DOTS 4) Desa terlatih pengamatan jentik nyamuk 5) % fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia 6) Kab/kota yang melaksanakan skrining jiwa 7) % DPS yang tersosialisasikan ISCT 8) kab/kota yang melakukan deteksi dini kanker 9) fasilitas kesehatan yang melakukan strategi DOTS 10) Kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	9) 100% 10) 5 kab/kota	9) 100% 10) 5 kab/kota	imunisasi lengkap tahun 2021: 75.6%
19		Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota	514 kab/kota						
20		Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%	86%						

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kualitas kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Stunting adalah tantangan utama di DIY saat ini. Telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas. Upaya selama ini yang telah dilakukan antara lain imunisasi bayi, persalinan di fasilitas kesehatan, pemantauan kesehatan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan bayi balita. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan dan memberi dampak perbaikan namun demikian masih bersifat dinamis.

Penyakit tidak menular di DIY semakin mendominasi dengan risiko kematian yang semakin tinggi. Faktor-faktor yang menjadi pemungkin dalam hal ini adalah kebiasaan merokok, olahraga, pola makan yang sehat, dan disiplin pengobatan. Hasil Riskesdas Kemenkes RI, menyatakan bahwa DIY memiliki prevalensi tinggi dalam masalah kesehatan jiwa dan oleh karenanya tatakelola perawatan dan pengobatan rutin masih menjadi tantangan di DIY.

Pengendalian penyakit menular di DIY telah semakin membaik namun beberapa penyakit menular masih menjadi permasalahan yaitu Tuberculosis, DBD, HIV disamping pandemic COVID-19. Penanganan COVID-19 menunjukkan perbaikan sementara untuk DBD masih fluktuatif dan saat ini pengendalian DBD telah mengalami kemajuan baru dengan penerapan bio-ekoteknologi. Permasalahan TBC masih menghadapi tantangan dalam upaya pengobatan dan perilaku pencegahan. Terkait dengan penyehatan lingkungan, provinsi DIY memiliki catatan capaian yang cukup baik dan menjadi pendukung penting dalam upaya pencapaian SDG's di DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik wilayah dengan keragaman potensi bencana dan kejadian luar biasa penyakit. Pengalaman bertahun-tahun telah memberikan referensi berharga termasuk dalam hal ini pandemi COVID-19. Tantangan di DIY saat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang terlindungi dari krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa, sebagaimana saat ini dialami dalam pandemic COVID-19.

Bapak Gubernur DIY telah pengarahannya bahwa pembangunan di DIY adalah filosofi pembangunan berbasis budaya dan upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran kondisi kesehatan antar wilayah di DIY saat ini memperlihatkan bahwa wilayah selatan (Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo) memiliki kondisi capaian kesehatan

yang masih tertinggal dengan wilayah Kota dan Sleman. Oleh karenanya tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kesehatan di DIY saat ini adalah upaya yang berkaitan dengan pengurangan disparitas wilayah tersebut.

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dalam RPJPD DIY 2005-2025

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi.

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi, dan aspek-aspek potensial, serta perkembangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, maka ditetapkan visi pembangunan DIY yang akan dicapai dalam 2005 sampai dengan 2025 adalah: **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Salah satu definisi masyarakat yang maju adalah masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Terdapat empat sasaran pembangunan jangka panjang daerah, yaitu:

1. Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025;
2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025;
3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025; dan
4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025, yang di antaranya ditandai oleh
  - a. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak, dan remaja; dan
  - b. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Penekanan pada lima tahun keempat (2020-2025) adalah **“penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi”**.

Fokus pelaksanaan pembangunan tersebut, diinisiasi melalui misi yang meliputi:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; dan
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Dalam tahap IV ini, arah kebijakan dalam bidang kesehatan yaitu menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan. Prioritas pada tahap IV yaitu:
  - a. Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;

- b. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik; dan
- c. Peningkatan wawasan masyarakat yang responsif terhadap penyakit menular.

### 3.3 Telaah Renstra K/L

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 misi berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden tahun 2020-2024 tersebut sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
2. Menurunkan angka stunting pada balita;
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri.

Di samping itu, terdapat 5 prioritas kerja Presiden tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur  
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah
  - d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta
3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja  
Memangkas hambatan investasi

4. Reformasi Birokrasi
  - a. Kecepatan melayani dan memberi izin
  - b. Menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman
  - c. Adaptif produktif, inovatif, dan kompetitif
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran  
 APBN dipatikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya prioritas kerja Presiden tersebut di atas, terutama dalam pembangunan SDM. Tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya kesehatan; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

### **3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu

terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012

tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan bahwa KLHS sebagai “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh

daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Tahap berikutnya adalah merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD. Dari proses pra-pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
4. Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Persoalan kemiskinan ini memiliki implikasi yang luas dan kompleks pada Kesehatan, di antaranya:

a. Gizi

Tingginya angka kemiskinan berpengaruh kepada status gizi. Mereka yang berada pada garis kemiskinan merupakan orang-orang yang berada pada situasi rawan pangan. Angka ketersediaan energi dan protein di DIY sudah melebihi standar Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Tahun 2012, yaitu angka ketersediaan energi sebesar 3.735 kkal/kap/hari (tahun 2020) dengan standar 2.400 kkal/kap/hari, sedangkan angka ketersediaan protein sebesar 108,04 gram/kap/hari (tahun 2020) dengan standar 63 gram/kap/hari. Meski demikian, tingkat konsumsi energi penduduk DIY belum sesuai standar, yaitu sebesar 2.146,60 kkal/kap/hari (tahun 2020) dengan standar 2.150 kkal/kap/hari sedangkan angka konsumsi protein sudah melebihi standar, yaitu 69 gram/kap/hari dengan standar 57 gram/kap/hari.

Adapun gambaran status gizi di DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Prevalensi Balita Stunting tahun 2020 sebesar 11,08%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 10,69%.
- 2) Balita Kurang Energi Protein (KEP) tahun 2020 sebesar 8,28%, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 8,35%.
- 3) Angka BBLR tahun 2020 sebesar 6,1%, naik dibanding tahun 2019 (5,7%).
- 4) Cakupan Asi Eksklusif tahun 2020 sebesar 81,5%, naik dibanding tahun 2019 sebesar 77,5%.

5) Cakupan ibu hamil anemia tahun 2020 sebesar 15.84%, naik dibanding tahun 2019 (15,69%).

6) Ibu hamil KEK tahun 2020 sebesar 12.96%, naik dibanding tahun 2019 (12,68%)

b. Pembiayaan Kesehatan

Angka kemiskinan yang tinggi menyebabkan perlunya upaya pembiayaan kesehatan utamanya pada masyarakat miskin. Tahun 2020, cakupan penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 1.552.318 orang dan 458.923 orang dari PBI APBD dengan total jumlah PBI 2.011.241 orang, sedangkan peserta Non PBI sebanyak 1.371.808 orang sehingga total masyarakat yang telah memiliki jaminan Kesehatan sebanyak 3.383.049 orang (92,2%). Pembiayaan tersebut masih belum menjamin semua masyarakat miskin di DIY. Pemerintah DIY melalui Bapel Jamkesos memberikan Bantuan Jaminan Kesehatan pada masyarakat miskin non jaminan, *marginal* dan disabilitas. Pelayanan jaminan kesehatan kuratif, preventif, dan rehabilitatif yang telah dilakukan Bapel Jamkesos hingga akhir tahun 2020 adalah sebanyak 17.935 pasien.

Program Pembiayaan Kesehatan di DIY telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman di tingkat Pusat, diantaranya untuk Program Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin. Berbagai upaya program pembiayaan Kesehatan telah dilakukan dan dimonitor terhadap implementasinya di lapangan khususnya terhadap cakupan kepesertaan serta mutu pelayanan Kesehatan masyarakat.

c. Pelayanan Kesehatan Terbatas di Kawasan Selatan

Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Selatan, menjadi dasar untuk pengembangan layanan kesehatan di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Pengembangan RS Paru Respira menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah selatan.

d. Pengendalian Pencemaran Lingkungan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada Tempat-Tempat Umum (TTU) dan tempat pengelolaan makanan. Hasil Inspeksi pada sarana pendidikan, 93,30% memenuhi syarat, Sekolah Dasar (SD) 93,80% memenuhi syarat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 91,5% memenuhi syarat, dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) 93,20% memenuhi syarat. Untuk sarana kesehatan, semua Puskesmas memenuhi syarat, RS 100% memenuhi syarat, hotel bintang 100% memenuhi syarat dan non bintang 84,4% yang memenuhi syarat. Sedangkan pada tempat-tempat umum yang lain, 90,11% sudah memenuhi syarat kesehatan. Pada inspeksi kesehatan lingkungan di tempat pengelolaan makan, 66,90% memenuhi syarat hygiene sanitasi. Penduduk dengan sanitasi layak dengan memiliki jamban sehat sudah mencapai 93,28% dan akses sanitasi 100%, serta akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas mencapai 94,30%.

e. *Multiple Burden of Disease*

Multiple Burden of Disease yaitu penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyakit oleh karena gaya hidup, *new emerging disease*, seperti SARS, Flu Burung, dan penyakit lama yang muncul kembali (*reemerging disease*), seperti ZIKA. HIV/AIDS, Tuberkulosis, Demam Berdarah menjadi masalah prioritas penyakit infeksi. DIY sebagai kota wisata dan pendidikan beresiko untuk penularan HIV. Didukung dengan peredaran narkoba yang kian marak. Penemuan kasus baru HIV pada tahun 2020 adalah 363 kasus dan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus.

f. Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis masih menjadi masalah karena masih banyak penderita TB yang belum ditemukan, sehingga resiko penularan di masyarakat masih tinggi. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan angka penemuan kasus TB semakin menurun. Penurunan penemuan kasus TB secara nasional adalah sebanyak 25,3% dengan kondisi penurunan di setiap provinsi bervariasi antara 8,4%-48,4%, sedangkan di DIY sendiri mengalami penurunan sebesar 12,7% yaitu 44% pada tahun 2019 menjadi 31,4% per 27 Februari 2021. Angka keberhasilan pengobatan TB secara nasional juga menurun sebesar 1%, namun di DIY angka keberhasilan pengobatan meningkat sebesar 2,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pasien TB di DIY yang sudah ditemukan tetap bisa menjalani pengobatan dengan baik sampai selesai dan tidak banyak pasien yang mengalami *drop out* (DO) akibat pandemi COVID-19.

g. Demam Berdarah (DBD)

Jumlah kasus demam berdarah masih tergolong tinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3.623 orang. Jumlah kasus tertinggi terdapat di Kabupaten Bantul (1.222), diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul (979), Kabupaten Sleman (810), Kabupaten Kulon Progo (316), sedangkan jumlah kasus terendah di Kota Yogyakarta (296). Jumlah total kematian akibat DBD sebanyak 13 orang dengan jumlah kematian terbanyak di Kabupaten Bantul (4 orang) dan Kabupaten Gunung Kidul (4 Orang).

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Kesehatan DIY beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah melakukan koordinasi internal untuk menetapkan isu-isu strategis Dinkes DIY. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penetapan isu-isu strategis adalah RPJP DIY 2005-2025, RPJMN 2020-2024, evaluasi capaian RPJMD 2017-2022, dan Agenda Prioritas Gubernur DIY. Berikut ini adalah isu-isu pokok dan/atau isu-isu strategis yang menjadi masalah prioritas:

1. Upaya *recovery* pasca Covid-19 dan percepatan penyelesaian target vaksinasi COVID-19,
2. Permasalahan kedaruratan dan potensi bencana lainnya,
3. Multiple burden disease dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (re-emerging and new emerging disease) serta potensi kejadian luar biasa,
4. Permasalahan gizi dan kesehatan ibu dan anak, dan
5. Permasalahan dalam pelayanan kesehatan (kualitas pelayanan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan).

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

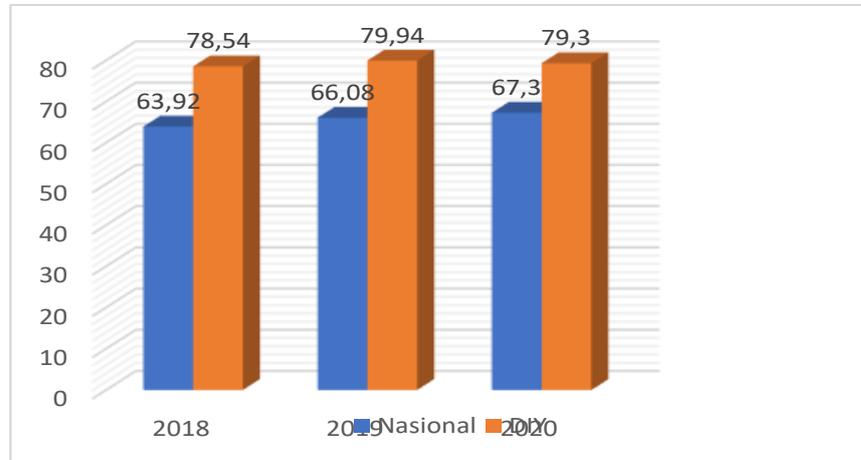
Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Stunting di antaranya berdampak terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan sistem kekebalan tubuh. Percepatan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah di bidang kesehatan. Berdasarkan data Riskesdas dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menurun dari tahun ke tahun, yaitu 27.6 (2007), 27.3 (2013), 21.46 (2018), 21 (2019), dan 17.3 (2021).

Untuk mengetahui seberapa baik penanganan stunting di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun analisis kinerja penurunan stunting melalui Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) yang diinisiasi sejak 2018. IKPS terdiri dari 12 indikator yang dikelompokkan dalam 6 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Kesehatan
  - a. imunisasi,
  - b. penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan, dan
  - c. keluarga berencana (KB) modern.
2. Dimensi Gizi
  - a. ASI eksklusif, dan
  - b. makanan pendamping (MP) ASI.
3. Dimensi Perumahan
  - a. air minum layak, dan
  - b. sanitasi layak.
4. Dimensi Pangan
  - a. mengalami kerawanan pangan, dan
  - b. ketidakcukupan konsumsi pangan.
5. Dimensi Pendidikan
 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Dimensi Perlindungan Sosial
  - a. pemanfaatan jaminan Kesehatan, dan
  - b. penerima KPS/KKS.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki capaian IKPS tertinggi pada tahun 2018-2020. Gambar 4.1 berikut menunjukkan capaian IKPS DIY tahun 2018-2020.



Gambar 4. 1 Capaian IKPS DIY

Oleh karena itu, IKPS ini perlu dituangkan menjadi program dan kegiatan yang lebih implementatif dengan menuangkan prevalensi stunting sebagai tujuan Renstra Dinas Kesehatan DIY 4 tahun ke depan. Berikut rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan DIY beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
			1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	16	14	13.7	13.3

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
			1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,36	0,39	0,42
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam empat tahun mendatang yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Terwujudnya Keluarga Sehat 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Pemerintah Daerah	1. Fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana dan KLB dengan penekanan <i>pre-hospital emergency</i>	Optimalisasi upaya perencanaan, pencapaian, dan pengendalian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan meningkatkan kemitraan lintas sektor
		2. Fokus pada penguatan layanan kesehatan <i>Primary Health Care</i> , RS, dan pengembangan RS Respira menjadi RS Unggulan Paru di wilayah selatan DIY	Optimalisasi mutu layanan dan mengembangkan sarana upaya pelayanan kesehatan khususnya di wilayah selatan DIY
		3. Fokus pada intervensi penurunan stunting	Optimalisasi konvergensi program untuk pencapaian penurunan stunting
		4. Fokus pada <i>bridging system/integrasi</i> sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan	Optimalisasi implementasi dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi dan <i>real time</i>
		5. Mendukung budaya menjadi <i>mainstream</i> pembangunan dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional	Optimalisasi pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas
		6. Fokus pada pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan Kesehatan masyarakat	Optimalisasi pengarusutamaan gender pada pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan

## BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ), Kegiatan ( <i>output</i> ), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM	93,1%	161.799.983.502	93,1%	305.039.602.810	93,6%	174.672.934.450	94,1%	381.925.572.108	94,6%	314.040.315.600	94,6%	1.175.678.424.968
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	n/a	24.069.566.992	6 dokumen	209.882.679.310	4 dokumen	82.642.288.750	4 dokumen	281.688.423.408	4 dokumen	230.559.443.383	4 dokumen	804.772.834.851
		Penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	n/a		5 paket									

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik.	n/a		31 unit		35 unit		902 unit		501 unit		501 unit	
1.02.02.1.0 1.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	n/a	4.012.168.000	2 unit	6.336.275.110	4 unit	52.692.677.250	0	0	0	0	6 unit	59.028.952.360
1.02.02.1.0 1.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	n/a	2.659.700.000	2 unit	175.000.000.000	1 unit	10.450.000.000	1 unit	244.890.144.052	1 unit	144.277.354.532	1 unit	574.617.498.584
1.02.02.1.0 1.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	n/a	486.100.000	11 unit	5.386.800.000	15 unit	256.000.000	892 unit	15.877.397.356	491 unit	62.744.899.976	491 unit	84.265.097.332
1.02.02.1.0 1.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	n/a	0	29	4.280.305.700	0	0	0	0	0	0	0	4.280.305.700

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.02.1.0 1.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	n/a	0	1 unit	1.104.930.000	0	0	1 unit	250.000.000	0	0	2 unit	1.354.930.000
1.02.02.1.0 1.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	n/a	4.116.061.600	16 unit	4.902.764.000	15 unit	3.049.700.000	8 unit	3.046.000.000	9 unit	3.924.000.000	9 unit	14.922.464.000
1.02.02.1.0 1.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	n/a	194.054.000	6 dokumen	406.604.500	4 dokumen	234.911.500	4 dokumen	236.169.500	4 dokumen	241.169.500	4 dokumen	1.118.855.000
1.02.02.1.0 1.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	n/a	12.601.483.392	5 paket	12.465.000.000	5 paket	15.959.000.000	5 paket	17.388.712.500	5 paket	19.372.019.375	5 paket	65.184.731.875
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	507 orang	137.668.811.510	537 orang	95.087.693.500	552 orang	91.956.962.700	567 orang	100.158.527.700	582 orang	83.396.889.217	582 orang	370.600.073.117
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan Indeks Keluarga Sehat	n/a		39 dokumen		39 dokumen		39 dokumen		39 dokumen		39 dokumen	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan atau Masyarakat dan Operasional Rumah Sakit	n/a		36 doku men		29 doku men		34 doku men		35 doku men		35 doku men	
1.02.02.1.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	n/a	53.846.386.000	130 orang	1.038.605.000	145 orang	1.058.305.000	160 orang	1.068.425.000	175 orang	1.078.545.000	175 orang	4.243.880.000
1.02.02.1.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	n/a	1.692.794.000	407 orang	24.127.845.500	407 orang	19.122.309.050	407 orang	15.274.418.955	407 orang	12.325.961.851	407 orang	70.850.535.356
1.02.02.1.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	n/a	450.228.000	6 doku men	484.050.000	6 doku men	523.100.000	6 doku men	544.410.000	6 doku men	566.851.000	6 doku men	2.118.411.000
1.02.02.1.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	n/a	207.845.000	5 doku men	228.630.000	5 doku men	300.000.000	5 doku men	310.000.000	5 doku men	320.000.000	5 doku men	1.158.630.000
1.02.02.1.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	n/a	22.567.000	3 doku men	24.824.000	3 doku men	30.000.000	3 doku men	35.000.000	3 doku men	40.000.000	3 doku men	129.824.000

RENSTRA DINKES DIY 2023-2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.02.1.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	n/a	3.580.451.000	8 doku men	3.625.060.000	8 doku men	3.650.000.000	8 doku men	3.700.000.000	8 doku men	3.725.000.000	8 doku men	14.700.060.000
1.02.02.1.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	n/a	67.390.000	2 doku men	106.850.000	2 doku men	138.905.000	2 doku men	180.576.500	2 doku men	234.749.450	8 doku men	661.080.950
1.02.02.1.0 2.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	n/a	67.985.000	4 doku men	117.290.000	4 doku men	152.477.000	4 doku men	198.220.100	4 doku men	257.686.130	4 doku men	725.673.230
1.02.02.1.0 2.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	n/a	1.048.230.000	3 doku men	1.204.720.000	3 doku men	1.325.192.000	3 doku men	1.457.711.200	3 doku men	1.603.482.320	3 doku men	5.591.105.520
1.02.02.1.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)	n/a	1.776.359.500	10 doku men	1.549.710.000	11 doku men	1.704.681.000	11 doku men	1.720.000.000	11 doku men	1.800.000.000	11 doku men	6.774.391.000
1.02.02.1.0 2.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	n/a	70.730.013.560	8 doku men	59.882.655.000	8 doku men	57.609.976.500	8 doku men	56.745.582.200	8 doku men	56.046.675.000	8 doku men	230.284.888.700
1.02.02.1.0 2.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	n/a	208.740.000	1 doku men	229.614.000	1 doku men	252.575.400	1 doku men	277.832.940	1 doku men	305.616.234	1 doku men	1.065.638.574

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.02.1.0 2.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	n/a	325.443.000	4 doku men	487.280.000	4 doku men	557.280.000	4 doku men	561.900.000	4 doku men	566.520.000	4 doku men	2.172.980.000
1.02.02.1.0 2.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	n/a	3.350.679.450	2 doku men	1.452.500.000	7 doku men	4.971.101.750	12 doku men	17.513.390.805	3 doku men	3.922.742.232	39 doku men	27.859.734.787
1.02.02.1.0 2.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	n/a	293.700.000	6 unit	528.060.000	6 unit	561.060.000	6 unit	571.060.000	6 unit	603.060.000	6 unit	2.263.240.000
1.02.02.1.0 2.24	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga (2.02.1.02.24)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	n/a	8.640.000	815.000 keluarga	8.640.000	825.000 keluarga	8.640.000	832.000 keluarga	8.640.000	840.000 keluarga	8.640.000	840.000 keluarga	43.200.000
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jenis dokumen pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	3	5.100.000	3	5.700.000	3	6.300.000	3	7.000.000	3	7.700.000	3	26.700.000
1.02.02.1.0 3.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	5.100.000	182 doku men	5.700.000	182 doku men	6.300.000	182 doku men	7.000.000	182 doku men	7.700.000	182 doku men	26.700.000
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) dan rumah sakit yang	n/a	56.505.000	68 unit	63.530.000	73 unit	67.383.000	78 unit	71.621.000	83 unit	76.283.000	83 unit	278.817.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Tingkat Daerah Provinsi	melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar												
1.02.02.1.0 4.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	n/a	23.000.000	30 unit	25.000.000	35 unit	25.000.000	40 unit	25.000.000	45 unit	25.000.000	45 unit	100.000.000
1.02.02.1.0 4.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	n/a	33.505.000	38 unit	38.530.000	38 unit	42.383.000	38 unit	46.621.000	38 unit	51.283.000	38 unit	178.817.000
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>203.738.500</b>	<b>100%</b>	<b>2.732.621.560</b>	<b>100%</b>	<b>970.873.030</b>	<b>100%</b>	<b>975.873.030</b>	<b>100%</b>	<b>975.873.030</b>	<b>100%</b>	<b>5.655.240.650</b>
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sumber daya manusia kesehatan terdistribusi	n/a	0	5 orang	30.000.000	8 orang	30.000.000	12 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	120.000.000
1.02.03.1.0 1.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	n/a	0	5 orang	30.000.000	8 orang	30.000.000	12 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	120.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan	n/a	203.738.50 0	630	2.702.621. 560	490	940.873.03 0	500	945.873.03 0	500	945.873.03 0	500	5.535.240.65 0
		Pengembangan pelayanan pelatihan	n/a		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
1.02.03.1.0 2.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	n/a	180.988.50 0	630 orang	2.502.621. 560	490 orang	690.873.03 0	500 orang	690.873.03 0	500 orang	690.873.03 0	500 orang	4.575.240.65 0
1.02.03.1.0 2.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	n/a	22.750.000	1 dokumen	200.000.00 0	1 dokumen	250.000.00 0	1 dokumen	255.000.00 0	1 dokumen	255.000.00 0	1 dokumen	960.000.000
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman</b>	<b>100%</b>	<b>3.458.000</b>	<b>100%</b>	<b>29.224.000</b>	<b>100%</b>	<b>32.906.000</b>	<b>100%</b>	<b>35.788.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.470.000</b>	<b>100%</b>	<b>138.388.000</b>
1.02.04.1.0 1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana produksi dan distribusi Alkes, Obat, perbekes dan makanan minuman yang menerapkan standar	n/a	0	34 sarana	18.577.000	37 sarana	21.859.000	40 sarana	24.141.000	43 sarana	28.423.000	43 sarana	93.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.04.1.0 1.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	n/a	0	34 sarana	18.577.000	37 sarana	21.859.000	40 sarana	24.141.000	43 sarana	28.423.000	43 sarana	93.000.000
1.02.04.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Prosentase sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional yang menerapkan standar	n/a	3.458.000	75%	10.647.000	78%	11.047.000	81%	11.647.000	84%	12.047.000	84%	45.388.000
		Sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan perizinan UKOT	n/a		35 sarana		36 sarana		37 sarana		38 sarana		38 sarana	
1.02.04.1.0 2.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	n/a	3.458.000	35 sarana	10.647.000	36 sarana	11.047.000	37 sarana	11.647.000	38 sarana	12.047.000	38 sarana	45.388.000
2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Terwujudnya peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional</b>	100%	532.366.000	100%	612.220.000	100%	673.442.000	100%	740.786.000	100%	814.864.000	100%	2.841.312.000
2.22.08.5.0 8	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas dilakukan pengembangan tradisional	5 kab/kota	532.366.000	5 kab/kota	612.220.000	5 kab/kota	673.442.000	5 kab/kota	740.786.000	5 kab/kota	814.864.000	5 kab/kota	2.841.312.000

RENSTRA DINKES DIY 2023-2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.22.08.5.0 8.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	n/a	532.366.00 0	12 unit	612.220.00 0	12 unit	673.442.00 0	12 unit	740.786.00 0	12 unit	814.864.00 0	12 unit	2.841.312.00 0
<b>0.00.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>88,78 %</b>	<b>161.149.66 0.093</b>	<b>88,91</b>	<b>155.082.79 9.696</b>	<b>89,06</b>	<b>212.089.80 6.877</b>	<b>89,21</b>	<b>173.371.09 0.591</b>	<b>89,36</b>	<b>209.483.31 0.775</b>	<b>89,36</b>	<b>750.027.007 .939</b>
0.00.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	21 doku men	40.931.000	21 doku men	45.125.000	21 doku men	49.637.500	21 doku men	54.601.250	21 doku men	60.061.375	21 doku men	209.425.125
0.00.01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 doku men	31.929.000	4 doku men	35.125.000	4 doku men	38.637.500	4 doku men	42.501.250	4 doku men	46.751.375	4 doku men	163.015.125
0.00.01.1.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	21 doku men	2.281.000	2 doku men	2.500.000	2 doku men	2.750.000	2 doku men	3.025.000	2 doku men	3.327.500	2 doku men	11.602.500
0.00.01.1.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 doku men	6.721.000	15 doku men	7.500.000	15 doku men	8.250.000	15 doku men	9.075.000	15 doku men	9.982.500	15 doku men	34.807.500

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	752 orang/bln	90.475.871.528	752 orang/bln	95.943.333.965	768 orang/bln	105.537.667.362	784 orang/bln	116.091.434.098	801 orang/bln	127.700.577.507	801 orang/bln	445.273.012.932
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	26 laporan		26 laporan		26 laporan		26 laporan		26 laporan		26 laporan	
0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 laporan	90.249.431.528	752 orang	95.698.473.965	768 orang	105.268.321.362	784 orang	115.795.153.498	801 orang	127.374.668.847	801 orang	444.136.617.672
0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	26 laporan	220.440.000	28 dokumen	238.860.000	28 dokumen	262.746.000	28 dokumen	289.020.600	28 dokumen	317.922.660	28 dokumen	1.108.549.260
0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26 laporan	1.662.000	1 laporan	1.662.000	1 laporan	1.828.200	1 laporan	2.011.020	1 laporan	2.212.122	1 laporan	7.713.342

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0.00.01.1.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 laporan	4.338.000	25 laporan	4.338.000	25 laporan	4.771.800	25 laporan	5.248.980	25 laporan	5.773.878	25 laporan	20.132.658
0.00.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	74.180.000	1 dokumen	74.180.000	1 dokumen	81.598.000	1 dokumen	89.757.800	1 dokumen	98.733.580	1 dokumen	344.269.380
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan	
0.00.01.1.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 laporan	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	1 dokumen	2.662.000	1 dokumen	9.282.000
0.00.01.1.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	72.180.000	17 laporan	72.180.000	17 laporan	79.398.000	17 laporan	87.337.800	17 laporan	96.071.580	17 laporan	334.987.380
0.00.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	9.315.000	30 orang	9.500.000	30 orang	10.450.000	30 orang	11.495.000	30 orang	12.644.500	30 orang	44.089.500
0.00.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	9.315.000	30 orang	9.500.000	30 Orang	10.450.000	30 Orang	11.495.000	30 Orang	12.644.500	30 Orang	44.089.500

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan	18 Paket	1.131.463.500	20 Paket	2.124.260.000	20 Paket	2.146.606.000	20 Paket	2.441.266.600	20 Paket	2.597.393.259	20 Paket	9.309.525.859
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 unit		16 unit		14 unit		15 unit		14 unit		14 unit	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan	
0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 laporan	35.014.000	3 paket	41.456.500	3 paket	45.602.150	3 paket	50.162.365	3 paket	55.178.601	3 paket	192.399.616
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	209.358.500	3 paket	217.219.500	3 paket	238.941.450	3 paket	262.835.595	3 paket	289.119.154	3 paket	1.008.115.699
0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 laporan	83.566.000	6 paket	1.037.494.000	6 paket	1.141.243.400	6 paket	1.255.367.740	6 paket	1.380.904.514	6 paket	4.815.009.654

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0.00.01.1.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 laporan	255.016.000	5 paket	290.056.000	5 paket	319.061.600	5 paket	350.967.760	5 paket	386.064.536	5 paket	1.346.149.896
0.00.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 laporan	65.619.000	3 paket	72.240.000	3 paket	79.464.000	3 paket	87.410.400	3 paket	96.151.440	3 paket	335.265.840
0.00.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 laporan	6.996.000	2 dokumen	8.016.000	2 dokumen	8.817.600	2 dokumen	9.699.360	2 dokumen	10.669.296	2 dokumen	37.202.256
0.00.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes)	5 laporan	377.894.000	5 laporan	284.978.000	5 laporan	313.475.800	5 laporan	344.823.380	5 laporan	379.305.718	5 laporan	1.322.582.898
0.00.01.1.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Bapel Jamkessos)	5 laporan	98.000.000	2 dokumen	172.800.000	0	0	1 dokumen	80.000.000	0	0	0	252.800.000
0.00.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan	106 unit	25.192.322.000	103 unit	3.179.445.400	60 unit	56.793.766.000	32 unit	5.579.171.100	297 unit	28.963.117.110	297 unit	94.515.499.610
		Pengadaan mebel	1 paket		2 paket		2 paket		1 paket		1 paket		1 paket	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0.00.01.1.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 paket	0	1 unit	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
0.00.01.1.0 7.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 paket	0	1 unit	7.100.000	0	7.810.000	0	8.591.000	0	9.450.100	0	32.951.100
0.00.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	47.446.000	2 paket	854.519.000	2 paket	600.975.000	1 paket	2.900.000.000	1 paket	2.850.000.000	1 paket	7.205.494.000
0.00.01.1.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	569.642.000	68 unit	1.294.702.400	31 unit	1.104.231.000	6 unit	800.554.100	6 unit	3.360.409.510	6 unit	6.559.897.010
0.00.01.1.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	24.166.960.000	2 unit	440.000.000	1 unit	55.000.000.000	1 unit	630.701.000	1 unit	20.000.000.000	1 unit	76.070.701.000
0.00.01.1.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	408.274.000	31 unit	83.124.000	29 unit	80.750.000	25 unit	1.239.325.000	25 unit	2.743.257.500	25 unit	4.146.456.500
0.00.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY	20 laporan	4.296.326.665	20 laporan	4.832.442.731	20 laporan	5.425.167.915	20 laporan	5.816.027.433	20 laporan	6.024.700.903	20 laporan	22.098.338.982
0.00.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2.500.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.150.000	2 laporan	3.315.000	2 laporan	3.496.500	2 laporan	12.961.500

RENSTRA DINKES DIY 2023-2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0.00.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 laporan	1.477.044.200	8 laporan	1.649.127.000	8 laporan	1.890.209.000	8 laporan	2.128.852.340	8 laporan	2.170.088.014	8 laporan	7.838.276.354
0.00.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bapel Jamkessos)	10 laporan	2.816.782.465	10 laporan	3.180.315.731	10 laporan	3.531.808.915	10 laporan	3.683.860.093	10 laporan	3.851.116.389	10 laporan	14.247.101.128
0.00.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	84 unit	1.079.250.400	84 unit	1.270.311.000	83 unit	1.380.077.100	83 unit	1.440.352.310	83 unit	1.505.827.541	83 unit	5.596.567.951
0.00.01.1.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	218.091.000	50 unit	233.150.000	50 unit	932.600.000						
0.00.01.1.0 9.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	49.300.000	8 unit	75.800.000	8 unit	84.230.000	8 unit	93.853.000	8 unit	103.738.300	8 unit	357.621.300
0.00.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	147.587.400	16 unit	148.604.000	16 unit	160.539.400	16 unit	171.975.840	16 unit	184.428.424	16 unit	665.547.664

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ), Kegiatan ( <i>output</i> ), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Operasional atau Lapangan													
0.00.01.1.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	3.100.000	1 unit	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
0.00.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	162.620.000	2 unit	167.757.000	2 unit	212.157.700	2 unit	218.373.470	2 unit	225.210.817	2 unit	823.498.987
0.00.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	498.552.000	7 unit	640.000.000	7 unit	690.000.000	7 unit	723.000.000	7 unit	759.300.000	7 unit	2.812.300.000
0.00.01.1.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya	4 BLUD	38.850.000.000	4 Unit	47.604.201.600	4 Unit	40.664.837.000	4 Unit	41.846.985.000	4 Unit	42.520.255.000	4 Unit	172.636.278.600
0.00.01.1.1 0.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 BLUD	38.850.000.000	4 Unit	47.604.201.600	4 Unit	40.664.837.000	4 Unit	41.846.985.000	4 Unit	42.520.255.000	4 Unit	172.636.278.600

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	Prevalensi Stuntin	17,3	16	14	13,7	13,3	13,3

## BAB VIII PENUTUP

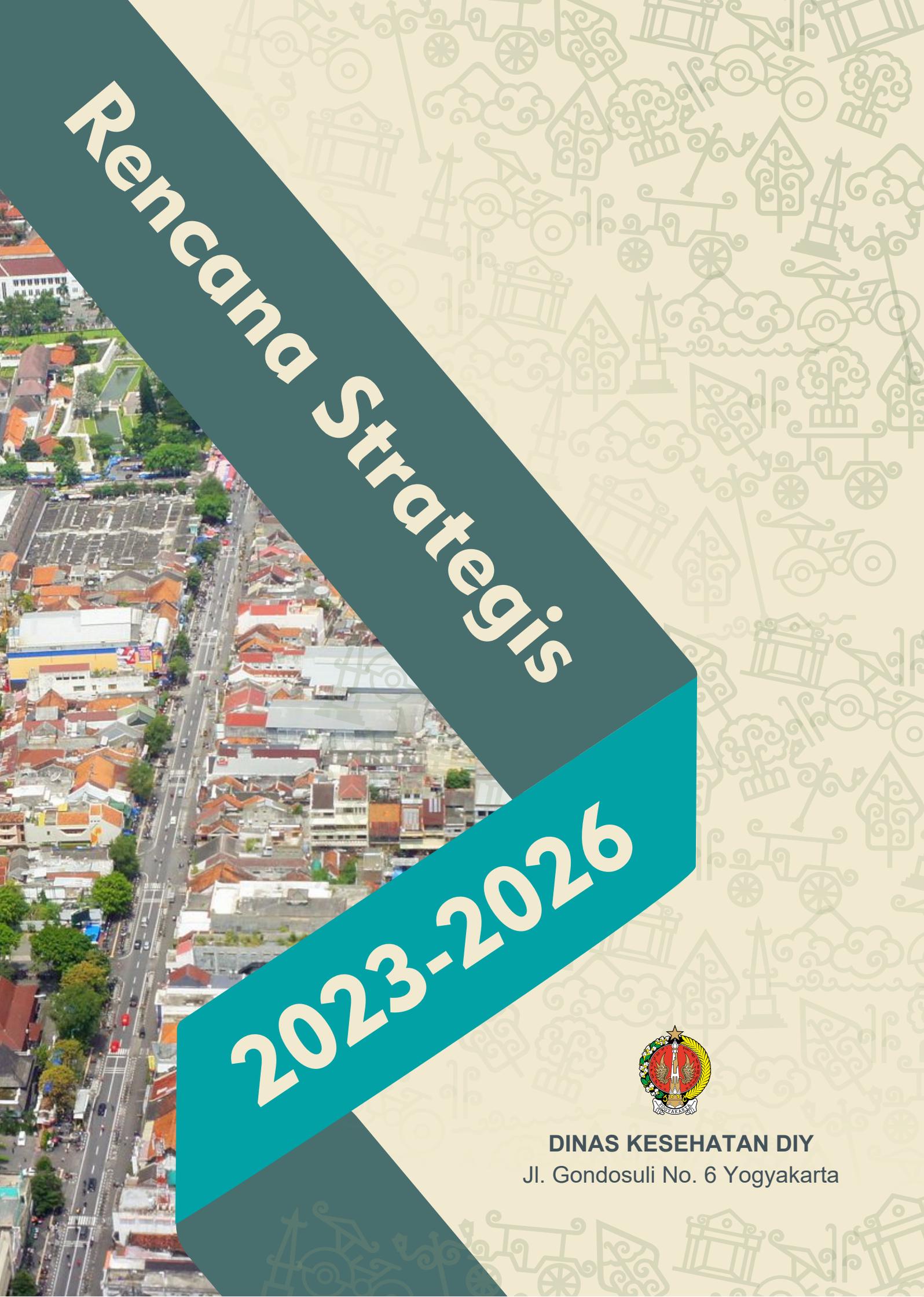
Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY mulai tahun 2023 hingga 2026. Perencanaan pembangunan dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengacu pada RKP Tahun 2023. Hal ini didasarkan pada tahun 2023 merupakan masa transisi antara perodesasi RPMD 2027-2022 dengan RPJMD periode 2022-2027, di mana dalam tahun 2023 masih dalam proses penyusunan.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung empat tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Yogyakarta, 22 Maret 2022

KEPALA,

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.  
NIP. 19650912 199303 2 006



# Rencana Strategis

# 2023-2026



**DINAS KESEHATAN DIY**  
Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta